

ANALISIS PERENCANAAN PENGENDALIAN BAHAYA PADA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) BERDASARKAN PP NO.50 TAHUN 2012 DI PT.X

Arif Setiawan, Ekawati, Baju Widjasena

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro

Email: arifsetiawan.osh@gmail.com

Abstract : Occupational safety and health is the main requirement to win on free market competition. On Government Regulation no. 50 of 2012 regulates that every companies with certain conditions must implement Occupational Safety and Health Management System (OSHMS). PT. X has a Department of Occupational Safety and Health newly established in February 2013 therefore the regulation of SMK3 still on process development. This research aims to know the suitability of hazard control planning on OSHMS in PT. X based on Government Regulation No.50 of 2012. This research is a descriptive qualitative in-depth interviews. The subjects of this study consists of 4 people as the main informants and 2 as an informant triangulation. The result of research is indicated hazard control planning implemented by the company has been following the Government Regulation No. 50 of 2012, but there are three things that are not appropriate. There are some objects that cannot be measured since there's no indicators of measuring, several target activities have no indicators of achievement, 12 regulations and other requirements have not been applied. PT. X need to provide achievement indicators for each target that they are going as well as immediately apply regulations are not appropriate.

Key Words : Planning, Hazard Control, OSHMS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah memiliki sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perusahaan dengan syarat tertentu seperti mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi harus menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, produktif serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁽¹⁾

Riset yang dilakukan badan dunia *International Labor Organization* (ILO) menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu setiap hari rata-rata 6000 orang meninggal.⁽³⁾ Menurut teori kecelakaan *Loss Causation Model* yang dikemukakan oleh Frank E. Bird, dikemukakan bahwa faktor manajemen merupakan latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan.⁽²⁾

Dalam manajemen terdapat empat fungsi utama yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan pengendalian, sehingga tanpa manajemen perencanaan yang kuat,

maka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak dapat dicegah⁽³⁾

PT. X memiliki departemen K3 (TUK) yang baru terbentuk dibulan Februari ditahun 2013 dan baru melakukan sertifikasi OHSAS 18001:2007 & Sertifikasi SMK3 ditahun 2014 sehingga dalam regulasi SMK3 yang ada diperusahaan masih dalam proses pengembangan.

Departemen K3 (TUK) dalam bekerja mengikuti waktu kerja kantor (*non shift*) dimulai pada pukul 07.30 – 16.30 WIB. sehingga tidak memiliki *shift* kerja 24 jam, hal ini akan berdampak kepada kesiapan perusahaan dalam menghadapi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja diluar jam kerja departemen K3 (TUK) dikarenakan perlunya pengawasan dan monitoring dalam setiap pekerjaan.

Menurut hasil audit tahun 2014 yang dilakukan oleh internal perusahaan pada tanggal 24 mei – 3 Juni 2014 dan lembaga audit Sucofindo pada tanggal 24 – 26 November 2014 masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki oleh perusahaan khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pengendalian bahaya seperti dalam *Hazard identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) yang dimiliki oleh PT. X masih belum sempurna dikarenakan ada beberapa pekerjaan rutin yang tidak termasuk dalam HIRADC,

dalam program K3 terdapat sasaran yang tidak terukur, prosedur lingkungan kerja belum jelas parameter dan metode pengukuran yang digunakan serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) belum tersedia secara lengkap disalah satu lokasi pekerjaan sehingga hal tersebut akan berdampak kepada kualitas perencanaan pengendalian bahaya yang dibuat oleh perusahaan.

Menurut data kecelakaan kerja yang terjadi tahun 2012 - 2014 dan data penyakit akibat kerja tahun 2013 - 2014 di PT. X berjumlah 83 kasus kecelakaan kerja dan terhitung ditahun 2012 – 2014 terdapat satu orang meninggal dunia setiap tahun serta terdapat 14 penyakit akibat kerja yang terjadi di PT. X.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti “analisis perencanaan pengendalian bahaya pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan (SMK3) PP No.50 tahun 2012 di PT. X”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Informan utama dalam penelitian ini adalah enam orang personel departemen K3 yaitu dua orang *safety engineer*, satu

enviroment engineer dan satu orang *advisor*. Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah *General Manager* TUK dan *Vice President Corporate Affairs*. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan utama.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik yaitu melalui perbandingan dan pengecekan kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan memeriksa data yang didapatkan melalui sumber lainnya. Sumber lainnya adalah selain wawancara kepada informan triangulasi juga dengan dokumen perusahaan.

Reliabilitas penelitian dapat dicapai dengan auditing data. Melakukan proses pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk mengetahui dan membandingkan rekaman, catatan wawancara dan kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Man pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Wakil pekerja/buruh, Ahli K3, P2K3, dan Pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam membuat sebuah rumusan perencanaan pengendalian bahaya PT. X telah melibatkan berbagai macam unit seperti departemen K3 (TUK) sebagai penggerak dari unit-unit lain

dan dari serikat pekerja sebagai manajer lini-pertama yang mengetahui proses kerja sebuah alat ataupun mesin kerja.

Setelah semua informasi diperoleh langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan dan persetujuan melalui rapat P2K3, namun jika kebijakan yang akan dibuat terdapat hal yang akan melibatkan pihak lain yang terkait maka pihak tersebut akan dilibatkan juga dan kebijakan tersebut akan dimasukkan kedalam kebijakan khusus.

Money pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Dana, sarana dan prasarana

Dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap K3 sangatlah besar hal ini tergambar dari hampir selalu disetujui semua permintaan yang diajukan oleh departemen K3 (TUK) untuk penyesuaian pelaksanaan K3 di PT. X dengan persyaratan perundangan yang berlaku, hal ini merupakan salah satu komitmen yang ditunjukkan perusahaan terhadap penerapan SMK3 serta hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Cost Benefits analysis* (CBA) yaitu dengan melihat *financial* terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dan benefit yang akan diperoleh serta untuk membandingkan keduanya secara kuantitas.⁽⁴⁾

Sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan untuk menunjang upaya pengendalian bahaya yaitu tersedianya APAR, *alarm kebakaran*, *fire truck*, jalur vakuumasi dan *hydrant*.

Material pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Komitmen

Dalam upaya penerapan SMK3 diperusahaan bukanlah suatu upaya yang mudah untuk dilaksanakan, banyak persiapan yang harus dipenuhi salah satunya ialah tidak terlepas dari komitmen manajemen organisasi yang bersangkutan serta dituangkan dalam sebuah kebijakan K3.⁽¹⁾⁽⁵⁾

Sejalan dengan hal tersebut bentuk komitmen yang diterapkan PT. X dapat dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012. Namun dari kebijakan tersebut perlu diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan agar semua aspek terkait keselamatan dan lingkungan dapat berjalan beriringan.

Berdasarkan data kecelakaan kerja diperusahaan tiga tahun terakhir terdapat 83 kasus kecelakaan kerja yang terhitung tinggi terjadi diperusahaan, hal tersebut dimungkinkan terjadi

karena dampak dari komitmen perusahaan terhadap K3 yang masih kurang atau baru sebatas pemenuhan peraturan saja hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara sikap terhadap K3 dengan komitmen perusahaan.⁽⁶⁾

2. Posisi K3

Dalam perusahaan yang telah berkomitmen dengan K3 haruslah mempunyai organisasi K3 dan ditempatkan di dalam struktur perusahaan yang strategis sehingga dapat menentukan keputusan K3 perusahaan secara mudah.⁽¹⁾ Struktur departemen K3 (TUK) di PT. X telah mengalami perubahan yaitu telah memiliki *Vice President* tersendiri yang menaungi departemen K3 (TUK) dan telah terintegrasi dengan Unit Lingkungan sehingga dalam perumusan perencanaan pengendalian bahaya dapat beriringan.

3. Hasil evaluasi terdahulu

PT. X telah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan K3 yang telah mereka laksanakan dengan durasi setiap enam bulan sekali dalam sebuah wadah yaitu *management review*. Dari *management review* didapatkan berbagai masukan dari

berbagai unit terkait penerapan K3. Kecelakaan kerja dan rasa tidak aman dari para pekerja pada saat bekerja dapat terjadi karena kelalaian manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan.⁽⁶⁾

Management Review merupakan salah satu bentuk komunikasi internal perusahaan, dalam situasi ini *management* dapat memanfaatkan untuk dapat menerima dan memberikan masukan kepada seluruh atau sebagian jajaran pekerja.⁽⁴⁾

Method pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Tinjauan awal kondisi K3

Tinjauan awal bertujuan untuk mengetahui kesesuaian awal perusahaan terhadap K3 dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁽¹⁾

Tinjauan awal yang dilakukan oleh PT. X melibatkan konsultan untuk membantu departemen K3 (TUK) dalam menganalisis *gap* atau jarak yang terjadi di perusahaan saat itu dengan peraturan yang ada. Kemudian dari hasil yang sudah didapat akan dibahas di rapat Direksi untuk ditindak lanjuti kekurangan tersebut. Dalam keberlangsungannya selain menggunakan jasa konsultan,

PT. X juga melibatkan pekerja dikarenakan sudah tertulis didalam PKB dan Keterlibatan wakil pekerja dalam melakukan tinjauan awal adalah sebagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh pencegahan kecelakaan kerja serta untuk pertimbangan dalam analisis potensi bahaya dan proses kerja yang terdapat di tempat tersebut.

Market pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Penjelasan dan penyebarluasan

PT. X dalam memberikan penjelasan dan penyebarluasan mengenai kebijakan yang mereka lakukan ialah dengan cara sosialisasi dengan berbagai macam media promosi dan bekerjasama dengan unit-unit lain.

penyampaian informasi perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang disampaikan untuk memberikan pendapatnya secara apresiatif dan sebagai *problem solver* yang baik.⁽⁴⁾

Machine pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Alat kerja

Dalam setiap alat kerja yang dimiliki oleh PT. X dilakukan penilaian potensi bahaya dan risiko melalui

program HIRADC dan selalu dimonitor perkembangannya. Selain dilakukan monitoring juga dilakukan perawatan kepada alat kerja yang bekerja sama dengan unit *facility* sehingga dapat berjalan beriringan, alat kerja yang dilakukan perawatan yaitu alat kerja yang diatur oleh peraturan perundangan seperti pesawat angkat-angkut, berjana bertekanan, kelistrikan dan alarm kebakaran.

Proses penetapan tujuan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Dapat Diukur, satuan/indikator pengukuran dan sasaran pencapaian

Terdapat kualifikasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu dapat diukur, satuan/indikator pengukuran dan sasaran pencapaian. Namun masih terdapat beberapa sasaran pencapaian dalam tujuan kerja belum dapat diukur sehingga hal ini masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012.

2. Indikator pencapaian

Untuk melakukan suatu pengukuran keberhasilan sebuah program kerja terdapat beberapa cara diantaranya ialah menggunakan Key performance Indikator (KPI) yaitu metode yang digunakan untuk

mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan.⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tidak tertulis metode apa yang harus digunakan perusahaan dalam membuat indikator pencapaian namun yang tertulis adalah harus dapat ditentukan dengan parameter. PT. X dalam membuat indikator pencapaian masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dikarenakan masih terdapat beberapa indikator pencapaian dalam sasaran pencapaian belum dapat diukur.

3. Sistem Pertanggung jawaban

Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan analisa dokumen program kerja K3 terdapat sistem pertanggung jawaban yang dibuat oleh PT. X yaitu dimulai dari masing-masing penanggung jawab bertanggung jawab kepada General Manager TUK dan General Manager TUK bertanggung jawab kepada Vice President. Setiap program yang dibuat departemen K3 akan selalu bekerjasama dengan unit lain yang terkait.

Proses perumusan keadaan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. SDM Kompeten

kompetensi yang dimiliki oleh personel departemen K3 (TUK) di PT. X sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yaitu telah memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kompetensi K3 dan lingkungan secara umum.

Namun jika melihat kedalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional) terdapat kompetensi-kompetensi tertentu.⁽⁹⁾ Dari kompetensi kunci yang terdapat dalam SKKNI masih belum dimiliki secara optimal dari SDM TUK dikarenakan masih terdapat kekurangan dari kompetensi-kompetensi tersebut diantaranya ialah dari segi komunikasi, perencanaan dan pengorganisasian serta pemecahan masalah.

Dari kompetensi dibidang K3 yang telah dimiliki oleh personil departemen K3 (TUK) di PT. X masih belum mencukupi secara kuantitas karena cakupan yang dihasilkan masih kurang sehingga untuk pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Proses identifikasi kemudahan dan hambatan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Peraturan perundangan dan persyaratan yang digunakan

Menurut hasil wawancara terhadap informan mengenai pematuhan peraturan perundangan dan persyaratan lain di PT. X sudah menerapkan peraturan perundangan dan persyaratan lain secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi dari manajemen dan juga dari hasil audit namun masih terdapat 12 peraturan yang belum disesuaikan dalam pelaksanaannya.

Proses pengembangan rencana dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X

1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

PT. X dalam mengontrol bahaya yang ada diperusahaannya menggunakan HIRADC, Pembuatan HIRADC yang dilakukan ketika awal pembuatan sistem manajemen keselamatan dan setiap adanya perubahan atau penambahan yang mesin/ alat kerja atau proses kerja.

Namun perlu juga dilakukan penilaian dari segi manajemen dikarenakan manajemen keselamatan dan kesehatan merupakan ujung tombak dari sebuah sistem.⁽¹⁰⁾

2. Skala Prioritas

Dalam penentuan skala prioritas yang telah dilakukan perusahaan yaitu dengan melihat resiko tertinggi dari

sebuah unit atau pekerjaan sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

3. Jangka waktu pelaksanaan

Dari data yang diperoleh peneliti PT. X dalam merumuskan sebuah perencanaan pengendalian bahaya telah dicantumkan batasan waktu yang harus direalisasikan namun belum secara rinci mencantumkan satuan waktu yang digunakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pembuatan format jangka waktu pelaksanaan.

Dalam penentuan jangka waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan keterbutuhan masing-masing program dengan menimbang sumber daya yang dimiliki perusahaan oleh karena itu perhitungan sumberdaya khususnya dana sangat perlu diperhatikan.⁽⁴⁾

KESIMPULAN

1. Dalam analisis perencanaan pengendalian bahaya pada SMK3 berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 di PT. X dapat dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dikarenakan masih terdapat tiga hal

- yang belum sesuai yaitu terdapat beberapa sasaran yang tidak terdapat satuan/indikator pengukuran sehingga tidak dapat diukur, belum adanya indikator pencapaian pada beberapa sasaran yang tidak dapat diukur dan masih terdapat 12 peraturan perundangan dan persyaratan lain yang belum diterapkan oleh perusahaan.
2. *Man* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari departemen K3 (TUK) sebagai penggerak dan pihak yang paham mengenai K3, perwakilan pekerja/buruh sebagai manajer lini-pertama yang mengetahui proses kerja dan alat kerja serta P2K3 sebagai tempat pembahasan dan persetujuan semua kebijakan ataupun perencanaan, namun jika terdapat hal yang akan melibatkan pihak lain atau pihak eksternal itu akan dimasukkan kedalam kebijakan khusus.
 3. *Money* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari dana, sarana dan prasarana yang didukung penuh oleh pimpinan perusahaan.
 4. *Material* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari komitmen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya kebijakan tertulis mengenai K3 yang ditanda tangani serta disahkan oleh pimpinan puncak dan posisi departemen K3 (TUK) dalam struktural perusahaan telah ditempatkan diposisi yang strategis sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan keputusan serta adanya *management review* untuk evaluasi kegiatan K3.
 5. *Method* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari tinjauan awal kondisi K3 yang melibatkan perwakilan pekerja/buruh serta melibatkan konsultan untuk membantu dalam menganalisis *gap* dengan peraturan perundangan.
 6. *Market* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari penjelasan dan penyebaran informasi melalui sosialisasi dengan berbagai macam media promosi dan bekerjasama dengan unit-unit lain.
 7. *Machine* pada perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari alat kerja yang dilakukan penilaian potensi bahaya dan resiko melalui program HIRADC dan selalu dimonitor keberlangsungannya serta dilakukan perawatan rutin.
 8. Proses penetapan tujuan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari

- satuan/indikator pengukuran dan indikator pencapaian namun masih belum dapat diukur secara pasti serta sudah terdapat alur pertanggung jawaban yang jelas.
9. Proses perumusan keadaan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari kompetensi SDM yang sudah memiliki keahlian K3 dan lingkungan secara umum. serta sudah tercukupinya SDM yang ada di TUK namun jangkauan yang dicapai masih kecil.
 10. Proses identifikasi kemudahan dan hambatan dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari peraturan perundangan yang diterapkan oleh perusahaan namun masih terdapat 12 peraturan perundangan dan persyaratan lain yang belum *complied* dengan peraturan pemerintah.
 11. Proses pengembangan rencana dalam perencanaan pengendalian bahaya SMK3 di PT. X terdiri dari Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dalam bentuk HIRADC yang terdapat skala prioritas dan jangka waktu dalam menjalankan program, namun masih belum memperhitungkan faktor manajemen.
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. *tentang Sistem Manajemen K3*.
 2. Santoso Gempur. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher; 2004.
 3. Terry G. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara; 2009.
 4. Tarwaka. *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi (K3E) dalam Perspektif Bisnis*. surakarta: Harapan Press; 2015.
 5. Suardi, Rudi. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM; 2007.
 6. Maradona H. *Tinjauan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Area Penambangan Dan Pengolahan Tambang Terbuka PT. Atoz Nusantara Mining Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Yogyakarta: Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta; 2013
 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.42 Tahun 2008,

DAFTAR PUSTAKA

*Tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Ketenagakerjaan Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

8. Ranti Putri Pratiwi. *Penerapan Smart System Sebagai Metode Pengukuran Kinerja perusahaan (Studi Kasus Pada Ukm Hentoro Leather)*; 2014.
9. Asropi, SIP M. *Manajemen Pembangunan No. 57/I/Tahun XVI, 2007 Membangun Key Performance Indicator Lembaga Pelayanan Publik*. 2007.
10. Madill, Ken. *Standards Australia*. 2003.